

# Dialektika Paradigma Hubungan Internasional: Aliansi Atlantik dan Kawasan Pasifik

Bantarto BANDORO

**T**ULISAN ini mencoba melihat dasar-dasar yang membentuk paradigma aliansi Atlantik dan paradigma Pasifik serta interaksi antara kedua paradigma itu. Sebagai titik tolak, analisis akan difokuskan pada dua konsep sentral yang telah sejak lama menjadi dasar dari dua bidang studi hubungan internasional, yaitu ekonomi internasional dan keamanan internasional. Bidang studi yang disebut pertama terutama didasarkan atas gagasan liberalisme internasional, di mana negara-negara liberal, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat, dianggap sebagai pendukung utama kekuatan pasar dalam ekonomi internasional.<sup>1</sup> Pola

semacam ini mungkin dapat disamakan dengan model GATT.

Sedangkan yang selama ini diakui sebagai dasar dari bidang studi keamanan internasional adalah penangkal yang diperluas (*extended deterrence*).<sup>2</sup> Menurut konsep ini Amerika Serikat mencoba membendung kemungkinan agresi militer Uni Soviet, terutama di Eropa Barat, dengan ancaman eskalasi nuklir sebagai tanggapan. Bentuk penangkal semacam ini muncul oleh karena Amerika Serikat mempunyai komitmen keamanan di luar wilayahnya sendiri untuk melindungi wilayah-wilayah sekutunya. Pola hubungan semacam ini mungkin dapat disamakan dengan pola hubungan model NATO.

<sup>1</sup>Munculnya kembali liberalisme ekonomi pada dasarnya merupakan hasil dari tujuan kekuatan dan kebijakan luar negeri negara kapitalis dominan, yaitu Amerika Serikat. Jadi konstruksi orde pasca perang yang didasarkan atas prinsip-prinsip liberal merupakan kepentingan nasional Amerika Serikat pada waktu itu karena ia dianggap memiliki ekonomi terbesar dan terkuat serta dana cadangan terbesar. Lebih lanjut lihat Stephen Gill dan David Law, *The Global Political Economy, Perspective, Problems and Policies* (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1988), hal. 31.

<sup>2</sup>Diskusi mengenai *extended deterrence* dapat ditemukan dalam Glenn H. Snyder, *Deterrence and Defense. Toward A Theory of National Security* (Westpoer, Connecticut: Greenwood Press Publisher, 1975) terutama Bab 3.

## Liberalisme Internasional dan Penangkal yang Diperluas

Konsep liberalisme internasional dan penangkal yang diperluas lahir dalam lingkungan pemikiran Barat. Kedua konsep ini dan pola hubungan model GATT dan NATO telah sejak lama menjadi fokus analisis-analisis hubungan internasional. Suatu pemikiran yang mencoba menggabungkan kedua konsep dan model inilah yang kemudian membentuk apa yang dikenal dengan paradigma Aliansi Atlantik. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, kedua konsep di atas selalu dikaitkan dengan situasi di kawasan Eropa, Amerika dan Lautan Atlantik yang pada waktu itu menjadi pusat politik dunia setelah Perang Dunia II. Kawasan-kawasan itu dan pola hubungan yang berlaku dalam kawasan itu diorganisasikan dan dikendalikan oleh kekuatan hegemoni tunggal Amerika Serikat dalam konteks Aliansi Atlantik.

Tetapi hasil-hasil studi hubungan internasional yang muncul setelah Perang Dunia II menunjukkan bahwa sesungguhnya konsep liberalisme internasional dan penangkal yang diperluas telah lebih dahulu mewarnai kebijakan ekonomi dan politik Inggris, khususnya dalam abad antara Perang Napoleon dan Perang Dunia I. Liberalisme internasional dan strategi koalisi mendasari kebijakan ekonomi dan politik Inggris dan hal itu telah membantunya menjadi kekuatan yang mendominasi sistem internasional.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers* (New York: Random House, 1987), hal. 151-158. Lihat juga George Modelski, "The Long Cycles of Global Politics and the Nations States," *Comparative Studies and History* (April 1978), hal. 214-235; E.H. Carr, *The Twenty Years Crisis, 1919-1939* (London & Basingstoke: The Macmillan Press,

*Pax Britanica*, era sistem internasional yang didominasi oleh Inggris, mampu bertahan selama kurang lebih dua abad. Tetapi kemudian terjadi pergeseran besar-besaran dalam perimbangan kekuatan global secara keseluruhan karena tampilnya kekuatan ekonomi dan militer baru dan ketidakmampuan pemimpin dunia sebelumnya untuk menjamin tujuan-tujuan ekonomi dan politiknya. Amerika Serikat kemudian muncul sebagai kekuatan dunia baru dalam abad 20 menggantikan Inggris, dan secara demikian dianggap sebagai pemegang konsep liberalisme berikutnya.<sup>4</sup> Jadi ide yang terkandung dalam liberalisme internasional sesungguhnya menunjuk pada ekonomi suatu negara yang bersifat komersial, *politis* (sistem politik) yang liberal dan kekuatan maritim yang kuat. Amerika Serikat dianggap memiliki semuanya ini.

Sebagai kekuatan Atlantik dan sekaligus kekuatan Pasifik<sup>5</sup> Amerika Serikat telah mampu memberi sumbangan yang berarti bagi terpeliharanya tata internasional. Dalam konteks itu dan sesuai dengan posisinya Amerika Serikat mencoba menerapkan gagasan liberalisme dalam konteks Atlantik/Eropa di samping dalam realitas Pasifik/Asia. Kalau situasi keamanan di kedua kawasan ini kita amati lebih lanjut sesungguhnya terdapat beberapa persamaan. Di kawasan Eropa Barat dan Asia Timur Amerika Serikat sejauh ini masih menganggap Uni

<sup>4</sup>Diskusi mengenai munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia dalam abad 20 dapat ditemukan dalam Robert Keohane dan Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little Brown, 1977); Robert Gilpin, *War and Change in World Politics* (New York: Cambridge University Press, 1983).

<sup>5</sup>C.J. Bartlet, *The Rise and Fall of the Pax Americana* (New York: St. Martin's Press, 1974), hal. 86-120.

Soviet sebagai sumber ancaman. Atas dasar itulah Amerika Serikat mengadakan perjanjian pertahanan dengan Jepang tahun 1951 di Asia Timur dan dengan Jerman Barat 1951 di Eropa Barat. Dalam bidang ekonomi pun terdapat persamaan. Jerman Barat dan Jepang adalah dua negara yang mengalami kehancuran ekonomi akibat perang. Melalui Rencana Marshal tahun 1947 Amerika Serikat memulihkan perekonomian Eropa Barat dan hal yang sama pun dilakukannya terhadap Jepang tahun 1948.

Bantuan ekonomi besar-besaran Amerika Serikat kepada Jerman Barat dan Jepang dan dukungan okupasi pasukan Amerika Serikat di kedua negara telah mendorong bangkitnya kapitalisme liberal meskipun dengan cara yang berbeda. Di Jerman Barat pulihnya kapitalisme liberal terutama dipelopori dan dimotori oleh perusahaan-perusahaan Jerman dan didukung oleh birokrasi yang *fragmented*. Hasil kerjasama kedua unsur itu melahirkan kekuatan kapitalis liberal Jerman yang pada waktu itu melihat dunia dalam konteks kebijakan liberalisme liberal, suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat. Sebaliknya restorasi kapitalis liberal di Jepang dimotori oleh birokrasi Jepang dan didukung oleh bank-bank dan perusahaan dagang di negara itu. Menurut konsep liberalisme Jepang negara akan menjadi pelopor kemajuan masyarakat (*state leading the society*), dan dengan konsep ini Jepang memandang dunia dalam konteks kebijakan merkantilisme (*mercantilism*),<sup>6</sup> suatu kebijakan yang sangat berbeda dari kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat.

<sup>6</sup>Dalam konteks ini Jepang mencoba *catch up* negara-negara besar lainnya guna mempertahankan kohesi nasional dan stabilitas politik. Gill dan Law, *The Global Political Economy*, hal. 103.

## Kawasan Pasifik: Merkantilisme dan Penangkal Terbatas

Kondisi di kawasan Pasifik dilihat dari segi geografi maupun pola hubungan internasional memang berbeda dari kondisi di Eropa Barat, meskipun Amerika Serikat merupakan kekuatan intrusif di kedua kawasan itu. Dinamisme kawasan Pasifik tidak hanya diperlihatkan oleh tingginya interaksi antar negara-negara di kawasan, tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi dan ekspansi perdagangan. Semuanya ini menunjukkan betapa pentingnya kawasan Pasifik dalam membentuk penyesuaian global hubungan internasional dan ekonomi dunia. Dua keistimewaan (*features*) dari dinamisme kawasan Pasifik yang perlu dicatat adalah pertumbuhan ekonomi dalam formasi angsa terbang<sup>7</sup> dan meningkatnya interaksi horizontal antara Jepang dan negara-negara industri baru (*NICs*) maupun ASEAN. Keistimewaan-keistimewaan inilah yang sesungguhnya membedakan kondisi dan perkembangan kawasan Pasifik dari kondisi dan perkembangan di Eropa, dan secara demikian membentuk paradigma tersendiri, yaitu paradigma Pasifik, dengan Jepang, dan mungkin dengan Cina, sebagai negara *core* di kawasan.

Jika kita menggunakan disiplin ekonomi internasional untuk memandang konsep hubungan ekonomi internasional negara-negara kawasan Pasifik, terutama Asia Timur dan Tenggara, maka jelas bahwa hu-

<sup>7</sup>Teori "angsa terbang" pertama kali dikemukakan oleh Kaname Akamatsu untuk menggambarkan pola perkembangan Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut teori itu perkembangan ekonomi Asia-Pasifik dipelopori oleh Jepang dan diikuti oleh Negara Industri Baru (NIB) di Asia, beberapa negara anggota ASEAN dan sampai tingkat tertentu juga Cina, Vietnam dan Korea Utara.

bugan ekonomi internasional mereka tidak didasarkan atas liberalisme internasional tetapi merkantilisme internasional. Dalam arti, mereka lebih percaya akan suatu negara yang kuat yang dapat menggerakkan masyarakatnya ke arah kompetisi efektif dalam ekonomi dunia, dan hal itu pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan dan kemakmuran negara dan masyarakatnya.

Selanjutnya, dipandang dari sudut keamanan internasional negara-negara Asia Timur tidak menganut konsep penangkal yang diperluas melainkan penangkal terbatas (*finite deterrence*). Misalnya, Jepang oleh karena letak geografisnya, dan Cina karena jumlah populasi dan kekuatan nuklirnya, bukan merupakan sasaran ancaman Soviet yang berarti dibandingkan ancaman Soviet terhadap negara-negara Eropa Barat. Dan usaha untuk menangkal Soviet di Asia Timur lebih mudah diatasi meskipun dengan cara masing-masing. Jepang, misalnya, telah mengembangkan konsep keamanan komprehensif, sedangkan Cina juga mengembangkan konsep serupa dalam bentuk "perang rakyat."<sup>8</sup> Seperti yang akan kita lihat nanti, untuk negara-negara Asia Timur konsep keamanan yang bercorak penangkal terbatas lebih sesuai dengan konsep ekonomi yang bercorak merkantilisme internasional.

Kalau sistem internasional kawasan Pasifik yang didasarkan atas konsep merkantilisme internasional dan penangkal terbatas dapat direalisasi, mungkin Amerika Serikat tidak akan lagi menjadi negara *core* di ka-

wasan Pasifik. Selanjutnya, jika semua negara besar di Pasifik, termasuk Amerika Serikat, menerima konsep merkantilisme internasional, maka Amerika Serikat mungkin akan menutup pasarnya. Demikian pun, jika konsep penangkal terbatas diterima oleh semua negara besar di kawasan, termasuk juga Amerika Serikat, tentu Amerika Serikat akan menarik Armada VII-nya dari Pasifik. Tetapi tanpa pasar Amerika yang terbuka dan armada lautnya, sesungguhnya Amerika Serikat akan menjadi kurang berarti bagi Asia-Pasifik. Jika analisis ini betul, Jepang dan Cina akan menjadi negara-negara *core* di Pasifik, sedangkan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat akan menjadi negara pinggir seperti halnya Amerika Latin dalam sistem intra-Amerika.

Oleh sebab itu untuk mendukung analisis lebih lanjut mengenai interaksi kedua paradigma hubungan internasional itu, kita perlu mengkaji asal-usul historis konsep merkantilisme internasional dan penangkal terbatas Asia Timur, dengan harapan masa depan paradigma itu dapat dipahami lebih dalam. Meskipun salah satu atau kedua konsep itu juga dianut oleh beberapa negara Asia Timur, termasuk Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong, namun konsep-konsep itu dianggap mempunyai arti yang lebih penting justru karena dianut oleh Cina dan Jepang.

Kenyataan bahwa dua negara yang disebut terakhir merupakan negara besar di Asia adalah tidak dapat diingkari, meskipun masing-masing memiliki sejarah modern yang berbeda, terutama mulai dari Perang Cina-Jepang (1895-1896) sampai Perang Dunia II. Cina, misalnya, memiliki pengalaman-pengalaman di wilayahnya sendiri, seperti Perang Opium, pemberontakan Tai-ping, revolusi tahun 1911, invasi dan okupasi Jepang, perang saudara, revolusi tahun

<sup>8</sup>Perang rakyat merupakan model kekuatan militer Cina yang dikembangkan oleh Lin Biao tahun 1965 untuk menghadapi Perang Perlawanan Terhadap Jepang. William R. Heaton, Jr. "The Defense Policy of the Republic of China," dalam *The Defense Policies of Nations*, ed. Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti (Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 1982), hal. 423-424.

1949 dan revolusi kebudayaan. Pengalaman-pengalaman Cina ini dapat dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman Jepang dalam periode yang sama dan berlangsung di wilayah Jepang, yaitu Restorasi Meiji, serangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II dan okupasi negara itu di Jepang.

Pengalaman-pengalaman Cina dan Jepang yang berbeda itu sangat mempengaruhi kondisi negara mereka dan visi mereka mengenai konsep-konsep hubungan luar negeri. Dengan perkataan lain, konsekuensi dari perbedaan itu adalah bahwa dalam sejarah modernnya Cina dianggap sebagai negara yang tidak koheren. Sebaliknya Jepang, oleh karena sejarah modernnya yang lebih memperlihatkan usaha menciptakan kerukunan interen, dianggap cukup koheren. Hanya baru dalam beberapa tahun terakhir ini saja Cina dianggap mulai koheren dengan mendukung dan mempertahankan versinya sendiri mengenai merkantilisme internasional dan penangkal terbatas. Sedangkan Jepang sesungguhnya telah sejak lama menggunakan konsep itu sebagai dasar hubungan ekonomi luar negeri dan keamanan negaranya. Oleh sebab itu, tulisan ini akan lebih memfokuskan pada konsep merkantilisme dan penangkal terbatas Jepang.

### Jepang dari Restorasi Meiji ke Perang Pasifik

Perbedaan dalam konsep liberalisme ekonomi dan merkantilisme akan menyebabkan pula perbedaan dalam posisi *timing* industrialisasi. Kalau ide dalam konsep liberalisme menunjuk pada negara yang telah lebih dahulu melakukan industrialisasi, seperti Inggris dan Amerika Serikat, maka konsep merkantilisme menunjuk pada nega-

ra yang melakukan industrialisasi baru setelah Perang Dunia II, seperti Jerman Barat dan Jepang. Alasan perbedaan itu banyak dibahas oleh ahli sejarah ekonomi.<sup>9</sup>

Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa negara-negara yang baru melakukan industrialisasi setelah Perang Dunia (*late industrializers*) akan selalu berusaha melindungi industri-industri *infant* mereka dari negara-negara industri yang telah lebih dulu kuat. Selain itu, mereka membutuhkan akses ke pasaran yang lebih luas yang telah lebih dulu didominasi oleh negara industri kuat dan itu memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Semua ini mereka lakukan agar mereka dapat mengimbangi kecepatan laju pembangunan negara-negara industri dan untuk itu dipersyaratkan negara yang kuat dengan kebijakan merkantilis yang mampu memberi arah pada ekonomi yang berkembang.

Di kawasan Eropa negara yang menganut kebijakan merkantilis adalah Jerman, sedangkan di Asia adalah Jepang. Konsekuensinya terdapat berbagai persamaan dalam sejarah mereka mulai tahun 1860-an -- unifikasi Jerman dan Restorasi Meiji -- sampai Perang Dunia II. Tetapi industrialisasi Jepang sesungguhnya baru dimulai sekitar satu generasi setelah Jerman. Ini adalah salah satu faktor yang membuat Jepang menjadi negara yang menonjol dan bahkan kebijakannya lebih merkantilis daripada Jerman.

Kalau sebagai negara industri yang terlambat kedudukan Jepang sama dengan Jerman, sebagai negara kepulauan kedudukan Jepang sama dengan Inggris. Status Jepang

<sup>9</sup>Antara lain lihat James R. Kurth, "The Political Consequences of the Product Cycles: Industrial History and Political Outcomes," *International Organization*, No. 33/1 (Winter 1979).

yang disebut pertama membuatnya lebih menekankan usaha memperkuat negara sebagai pemandu ekonomi, sedangkan sebagai negara kepulauan ia lebih menekankan pada usaha mencari pasar luar negeri. Tetapi, seperti telah dikatakan tadi, oleh karena Jepang baru memulai proses industrialisasi setelah Perang Dunia II, maka ia kehilangan peluang untuk mengisi pasaran luar negeri yang telah dikuasai oleh negara-negara industri yang lebih dulu lahir. Dilihat dari perspektif ini Jepang dapat dianggap sebagai *late imperializer*, dan sesuai dengan statusnya sebagai negara kepulauan Jepang cenderung menjadi imperium *sea-borne* yang didukung oleh kekuatan laut. Jepang perlahan-lahan mulai mampu mengimbangi kekuatan yang telah ada pada waktu itu, yaitu Inggris.

Akan tetapi situasi yang dihadapi Inggris dalam kawasan Eropa berbeda dari situasi yang dihadapi Jepang di kawasan Asia. Di kawasan Asia, hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa Cina bersatu di bawah pemerintahan yang cukup lemah -- tidak seperti di kawasan Eropa yang terbagi menjadi beberapa negara tetapi cukup kuat -- dan hal itu memberi peluang kepada Jepang untuk menyerang daratan Asia, suatu peluang yang memang tidak dimiliki oleh Inggris. Dengan memanfaatkan peluang itu Jepang membuktikan dirinya sebagai kekuatan maritim yang kemudian bahkan mencoba menjadi kekuatan kontinental dengan mencoba menandingi kekuatan kontinental dan kekuatan maritim yang ada pada waktu itu, yaitu Jerman dan Inggris.

Keberhasilan usaha Jepang mengimbangi kemampuan maritim Inggris telah membantu terbentuknya aliansi Jepang-Inggris tahun 1902<sup>10</sup> dan hal itu telah memungkinkan Je-

pang memenangkan perang dengan Rusia pada tahun 1904 dan menganeksasi Korea tahun 1905.<sup>11</sup> Selanjutnya, kekalahan Rusia dari Jepang mendorong Inggris untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada Jerman sebagai satu-satunya kekuatan kontinental yang mengancam. Dan persepsi Inggris mengenai Jerman ini mendorong lahirnya *entente* (saling pengertian) antara Inggris dan Rusia tahun 1907 dan masuknya Inggris dalam Perang Dunia I. Sementara itu, di Asia aneksasi Jepang terhadap Korea merupakan awal lahirnya kekuatan kontinental Jepang, sehingga Jepang pada waktu itu berada dalam posisi untuk memperluas ekspansinya ke Manchuria dan untuk melakukan serangan secara penuh jika peluang timbul. Semua ini dilakukan oleh Jepang demi mendukung ide merkantilisme imperial.

Jepang dan Jerman memang diakui sebagai negara yang mampu mengembangkan industri yang paling kompetitif di dunia. Produk-produk mereka telah membuahkan kemakmuran dalam dasawarsa 1920-an dan ini berarti tersedianya pasar internasional yang terbuka. Kebijakan merkantilisme internasional menjadi semakin atraktif bagi kedua negara industri ini. Tetapi sebagai akibat depresi besar-besaran dalam dasawarsa itu, pasar internasional yang semula terbuka diisi oleh hambatan-hambatan perdagangan (*trade barriers*). Sebagai akibatnya ide merkantilisme imperialis timbul kembali, seperti diperlihatkan oleh Jepang dengan menyerbu Manchuria tahun 1931 dan Jepang sejak waktu itu bahkan menjadi kekuatan yang lebih kontinental daripada sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan itu, Jepang kemudian menjadi tempat bagi teoritis merkantilis membicarakan konsepsi-konsepsi

<sup>10</sup>Ian Nish, *The Origin of Russo-Japanese War* (London dan New York: Longman, 1985), hal. 73-74.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 313-216.

si yang canggih mengenai bagaimana suatu negara dapat mempertahankan perkembangan masyarakatnya dengan cara melakukan kompetisi dalam ekonomi dunia yang dinamis. Salah satu konsepsi yang muncul adalah *product trade cyclus*,<sup>12</sup> yang kemudian menjadi dasar intelektual bagi strategi industri dari Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang tahun 1930-an. Tetapi merkantilisme awal versi internasional ini gugur akibat munculnya ide imperialis, yaitu invasi Jepang terhadap Cina. Bahkan Kementerian Perdagangan dan Industri selama perang menjadi Kementerian Urusan Amunisi, sebelum ia berubah kembali menjadi Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri setelah perang.

Invasi Jepang terhadap Cina tahun 1937 semakin memperkuat Jepang sebagai kekuatan kontinental dan memberinya peluang untuk memperluas kekuatannya ke Indocina tahun 1940 dan 1941, akhirnya bahkan melibatkan diri dalam perang dengan Amerika Serikat yang dimulai dengan serangan diam-diam terhadap pelabuhan Pearl Harbor.<sup>13</sup> Di pihak Amerika Serikat, dalam usahanya mengembangkan penangkal yang diperluas, Amerika Serikat pada tahun 1940 memindahkan sebagian dari armada lautnya dari San Diego dan Long Beach ke Pearl Harbor. Tetapi seperti yang telah kita lihat Amerika Serikat mengalami kegagalan dalam strategi itu. Perang antara Jepang dan Amerika Serikat di Pasifik melengkapi perang di Eropa yang telah terjadi lebih dulu dan secara demikian melahirkan perang dunia.

<sup>12</sup>Mengenai teori ini lihat Gill dan Law, *The Global Political Economy*, hal. 200-201, 239.

<sup>13</sup>Mengenai serangan Pearl Harbor dilihat dari perspektif Amerika Serikat dapat dibaca Ronald H. Spector, *Eagle Against the Sun. The American War with Japan* (New York: Random House, 1985).

Oleh karena penyerbuan Jepang ke Cina dilakukan melalui darat, maka dapat dikatakan kebijakan Cina itu merupakan proyek angkatan darat Jepang dan tujuan kebijakan itu adalah untuk mengekalkan imperium merkantilis. Sedangkan Pearl Harbor merupakan proyek angkatan laut Jepang yang bertujuan untuk menjamin keamanan dari imperium yang telah dibentuk (ditandai dengan serangan terhadap Cina). Dilihat dari tindakan-tindakan Jepang itu, dapat dikatakan kebijakan Cina dan strategi Pearl Harbor dimaksudkan untuk membentuk tujuan-tujuan ekonomi dan keamanan Jepang. Menurut pemimpin Jepang hanya gabungan kekuatan darat dan lautlah yang dapat membantu Jepang mencapai tujuan-tujuannya.

Hasil kombinasi kebijakan dan strategi Jepang inilah yang kemudian melahirkan *Greater East Asia Co-prosperity Sphere*,<sup>14</sup> suatu orde Jepang di Asia yang ditopang oleh kebijakan merkantilisme internasional dan keamanan komprehensif. Usaha Jepang untuk menciptakan orde semacam itu merupakan awal perang Pasifik,<sup>15</sup> suatu pertempuran laut terbesar dalam sejarah, yang kemudian membawa kehancuran di pihak Jepang akibat serangan bom atom oleh Amerika Serikat, dan diakhiri oleh okupasi Amerika Serikat di Jepang. Kekuatan nuklir Amerika Serikat akhirnya mampu meredakan ambisi pemimpin militer Jepang untuk mendominasi hubungan internasional di Asia. Era baru Jepang dianggap dimulai awal-1950-an setelah Amerika Serikat mengakhiri okupasinya di negara itu.

<sup>14</sup>Mengenai pengaruh geopolitik terhadap konsep Jepang ini baca Jo Yung Whan, *Japanese Geopolitics and the Greater East Asia Co-prosperity Sphere* (University Microfilms International, 1964).

<sup>15</sup>Perspektif Jepang mengenai Perang Pasifik dikaji oleh Saburo Ienaga, *The Pacific War, 1931-1945* (New York: Pantheon Book, 1978).

## Jepang dari Okupasi ke Status Baru

Jepang berada di kawasan Asia-Pasifik dengan tingkat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat yang cukup tinggi dalam bidang ekonomi, teknologi maupun keamanan. Sebagai negara yang kalah perang dengan status negara berkembang, Jepang sejak tahun 1945 sepenuhnya bergantung pada lingkungan internasional yang menguntungkan yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Salah satu elemen dari lingkungan itu yang cukup penting adalah payung sekuriti. Dalam konteks ini, pada tahap awal pembangunan Jepang, Amerika Serikat mengambil alih seluruh peranan angkatan bersenjata Jepang termasuk keamanan di laut untuk menjamin suplai minyak dari Teluk Parsi dan Indonesia ke Jepang dan menjamin pasar di Asia Tenggara bagi produk-produk Jepang.

Setelah kalah perang, Jepang tidak lagi dianggap memiliki kekuatan maritim dan strategi kontinental yang berarti. Satu-satunya institusi yang dimiliki Jepang sejak sebelum perang dan kemudian menjadi institusi tertinggi dalam masa pasca perang adalah birokrasi.<sup>16</sup> Kekuatan birokrasi Jepang yang

telah ada sejak abad ketujuh dipertahankan oleh penguasa Okupasi sebagai upaya untuk melancarkan fungsi-fungsi pemerintahan di negara itu. Ini berarti bahwa penguasa Okupasi tetap mengakui supremasi satu-satunya pilar industri di Jepang dan oleh karena itu Jepang tetap dianggap memiliki strategi industri.

Jadi apa yang dilakukan oleh penguasa Okupasi sesungguhnya sangat membantu Jepang meningkatkan posisi dan statusnya di dunia. Dan hal itu dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar untuk memperkuat negara sebagai pemandu ekonomi yang tidak diarahkan pada imperium internasional, tetapi secara eksklusif diarahkan pada pengembangan strategi industri dengan sasaran pasar internasional. Posisi Jepang setelah okupasi justru jauh lebih baik daripada sebelum Perang Dunia II. Dengan posisi dan statusnya yang baru itu Jepang telah mampu mengembangkan visinya sendiri mengenai hubungan ekonomi internasional, yaitu merkantilisme internasional.

Perkembangan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II pada umumnya dianggap luar biasa. Periode pengalaman perkembangan Jepang yang menimbulkan rasa ingin tahu dan perhatian yang paling tinggi adalah tahun 1960-an dan awal 1970-an. Selama periode itu, Jepang sebenarnya telah mentransformasikan ekonominya dari ekonomi yang bisa dilukiskan sebagai suatu ekonomi tingkat menengah yang telah berkembang ke arah ekonomi yang paling maju di dunia. Pertumbuhan luar biasa ini disebabkan oleh ekspansi yang pesat dalam bidang industri. Selain itu, investasi yang pesat dalam teknologi baru dan peralatan mutakhir telah sangat membantu menaikkan produktivitas dan memberi dasar-dasar kuat yang membuat Jepang berhasil dalam per-

<sup>16</sup>Birokrasi ekonomi Jepang mulai bangkit dan berkuasa selama tahun 1930-an dan tahun 1940-an sebagai tanggapan atas krisis depresi, perang di Cina dan Perang Dunia II. Birokrasi tersebut mencapai kekuasaannya yang paling besar selama pendudukan sekutu awal tahun 1950-an pada waktu saingan utamanya, yaitu kaum militer dan *zaibatsu* menjadi lemah dan dihancurkan. Chalmers Johnson, "Lembaga Politik dan Pelaksanaan Ekonomi: Hubungan Pemerintah-Bisnis di Jepang, Korea Selatan dan Taiwan," dalam *Perkembangan Ekonomi Asia: Masa Kini dan Masa Depan*, penyunting Robert A. Scalapino, Seizaburo Sato dan Jusuf Wanandi (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1990), hal. 113. Lihat juga Takeshi Ishida, "Changes in Japanese Perceptions of the Occupation," *Asian and African Studies* 18 (1984), hal. 26.



saingan internasional. Banyak orang berpendapat bahwa hal itu adalah hasil bimbingan pemerintah Jepang yang meletakkan konsep merkantilisme sebagai dasar kebijakan ekonomi internasional Jepang.

Jepang memang telah mampu bangkit dari kedudukannya sebagai negara kecil dan lemah dalam lingkungan internasional menjadi negara yang berhasil dalam pembangunan ekonominya dan menjadi negeri yang secara ekonomis maju yang mampu melindungi industri domestiknya. Sebagai *late industrializer*, Jepang telah mampu membuktikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang besar dan menjadi pesaing utama ekonomi negara-negara Barat. Satu-satunya kekuatan yang mungkin mampu menghadapi kebijakan merkantilisme internasional Jepang adalah Amerika Serikat, tetapi ia tidak mengambil kebijakan khusus untuk menghadapi kebijakan Jepang semacam itu.

Persoalan mengapa Amerika Serikat tidak mencoba menandingi kebijakan Jepang telah banyak dibahas oleh pengamat. Robert Gilpin, misalnya, berpendapat bahwa prioritas kebijakan Amerika Serikat lebih diletakkan pada persoalan keamanan internasional daripada ekonomi internasional.<sup>17</sup> Keamanan internasional merupakan pertimbangan utama dari hubungan yang berorientasi pada keamanan. Dilihat dari segi ini motivasi Amerika Serikat untuk mengembangkan hubungan semacam itu dengan Jepang adalah untuk memperoleh sekutu regional.<sup>18</sup> Tetapi kedudukan Jepang dalam

hubungan semacam itu justru membuatnya memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar daripada sekutu Amerika Serikat di Eropa.

Konsep merkantilisme internasional Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya memandang negara sebagai motor utama masyarakat, agar mereka mampu melakukan kompetisi yang efektif dalam pasar dunia, di mana hal itu pada gilirannya akan meningkatkan kekuatan maupun kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Dengan kebijakan itu Jepang telah memperlihatkan keberhasilannya untuk mencapai tingkat tertinggi dalam pembangunan industri dan teknologi. Ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain khususnya negara industri baru di Asia Timur. Ada alasan bagi negara-negara industri maju di Asia Timur yang mempunyai kepentingan dalam pengalaman Jepang. Dengan mempelajari pertumbuhan Jepang yang pesat dan transformasi ekonominya yang dicapai, mereka (negara industri baru dan negara berkembang) berharap mengikuti haluan yang sama.<sup>19</sup>

Perhatian negara-negara pada persoalan memahami proses dan sifat perkembangan Jepang dapat bertujuan untuk mengevaluasi dampak ekonomi Jepang terhadap hubungan internasional. Dilihat dari perspektif ini konsep merkantilisme internasional melihat kompetisi ekonomi dunia tidak sebagai suatu permainan *zero-sum*, tetapi sebagai suatu permainan yang dapat memberikan hasil positif kepada banyak negara baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Jepang dewasa ini dianggap salah satu aktor (negara maju) dalam permainan itu yang

<sup>17</sup>Robert Gilpin, *US Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment* (New York: Basic Books 1975).

<sup>18</sup>Mark J. Gasiorowski dan Seung-hyun Baek, "International Client Relationships and Client States in East Asia," *Pacific Focus*, Vol. II, No. 2 (Fall 1987), hal. 114-143.

<sup>19</sup>Hadi Soesastro, "Jepang 'Guru' - ASEAN 'Murid': Apa Bisa Jalan?" dalam Scalapino, Sato, Wainandi, *Perkembangan Ekonomi Asia*, hal. 167.

memiliki kemampuan untuk melanjutkan dan mempertahankan pengembangan teknologi ataupun industri baru untuk selanjutnya ditransfer kepada negara-negara berkembang.

Telah dikatakan di muka bahwa Jepang telah memanfaatkan lingkungan internasional yang menguntungkan yang diciptakan oleh Amerika Serikat antara lain payung keamanan. Amerika Serikat lebih banyak memainkan fungsi keamanan untuk Jepang. Bahkan Pasukan Bela Diri (*SDF*) Jepang pada awal tahun 1950-an terutama dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Amerika Serikat.<sup>20</sup> Pakta Keamanan Bersama Jepang-Amerika Serikat memang telah diterima secara luas di Jepang sejak tahun 1950-an. Tetapi justru pada saat-saat seperti itu banyak keberatan di Amerika Serikat dikemukakan terhadap tidak adilnya hubungan keamanan Jepang - Amerika Serikat. Misalnya, pada saat Amerika Serikat mengeluarkan 5% sampai 6% GNP-nya untuk pertahanan dan defisit anggaran belanja meningkat, sementara itu Eropa menggunakan sekitar 3% GNP untuk pertahanannya, maka Jepang -- dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia industri -- mempunyai kebiasaan untuk tetap berada dalam batas 1% (sampai tahun 1987).

Jepang berhasil memanfaatkan lingkungan internasional semacam itu untuk keuntungan pembangunan ekonominya. Tetapi keasyikan Jepang ini malah menimbulkan tekanan-tekanan terutama dari Amerika Serikat agar Jepang mulai mengambil peran aktif. Jepang menyadari hal ini, dan lebih penting lagi ia menyadari bahwa ia memang

tidak dapat menjamin keamanannya secara sendirian. Oleh sebab itu, Jepang (mulai awal 1980-an) mencoba mengembangkan ekuivalen fungsional dengan mengkombinasikan kekuatan militer Amerika dengan kekuatan militer Jepang, kekuatan ekonomi dan postur diplomasi Jepang yang *low profile*. Kombinasi komprehensif inilah yang sesungguhnya menjadi dasar dari konsep keamanan komprehensif Jepang, yang meletakkan kekuatan ekonomi sebagai inti (*core*) dari keamanan itu.

Dilihat dari kerangka keamanan komprehensif ini konsep penangkal terbatas (*finite deterence*) yang dikembangkan oleh Jepang cukup masuk akal. Tidak seperti Perancis atau Cina, penangkal terbatas Jepang tidak digantungkan pada kekuatan nuklir. Aleri nuklir yang berkembang setelah tahun 1945 terlalu besar bagi Jepang untuk mengandalkan penangkal terbatas pada kekuatan nuklir. Konsep penangkal terbatas oleh Jepang dianggap lebih cocok untuk mendampingi kebijakan merkantilisme internasional, sebab hal itu berarti bahwa Jepang akan dapat lebih berkonsentrasi pada usaha mencari dan bersaing di pasar internasional.

Konsep Jepang mengenai penangkal terbatas dan merkantilisme internasional sebenarnya bertentangan dengan konsep Amerika Serikat mengenai hal yang sama. Sengket ekonomi dan keamanan antara kedua negara yang telah sejak lama berlangsung, membuktikan pertentangan itu. Tetapi adanya perbedaan itu justru menguntungkan Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya. Dalam arti bahwa sistem internasional yang ditopang oleh kebijakan Amerika Serikat seperti itu akan lebih memacu Jepang untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk melakukan kompetisi-kompetisi ekonomi. Kebijakan merkantilisme dan penangkal

<sup>20</sup>Martin E. Weinstein, *Japan's Postwar Defense Policy, 1947-1968* (New York & London: Columbia University Press, 1971), Bab Dua.

terbatas Jepang tentu juga menyumbang pada terciptanya kondisi-kondisi yang menguntungkan Jepang. Pemikiran mengenai hubungan ekonomi internasional dan keamanan terbatas Jepang mungkin dapat dilukiskan dalam suatu konsep yang lebih sederhana tetapi mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu konsep keamanan komprehensif.

Konsep ini muncul dari pemikiran Perdana Menteri Ohira (1978) yang kemudian dibahas oleh Kelompok Studi Mengenai Keamanan Nasional Komprehensif.<sup>21</sup> Kelompok ini memandang keamanan nasional sebagai suatu hal yang komprehensif yang mengandung dua kebijakan utama, yaitu kebijakan keamanan dalam pengertian yang sempit dan kebijakan keamanan ekonomi. Untuk menjalankan kebijakan komprehensif itu Kelompok Studi itu memberi rekomendasi agar Jepang mengambil inisiatif untuk menciptakan orde politik internasional yang damai dan membantu membentuk kerjasama di kawasan Pasifik (dalam tingkat regional). Selain itu, usaha diplomatik Jepang juga harus diarahkan untuk memajukan kerjasama regional maupun internasional dan menjamin arus sumber daya ekonomi.

Tesis konsep ini, jika kita kaji lebih dalam, adalah ketergantungan yang kompleks. Ide ketergantungan ini mengandung arti bahwa isu ekonomi dan keamanan dianggap sebagai *high politics*, suatu kebijakan yang lebih berorientasi pada keamanan negara, baik dalam pengertian keamanan itu sendiri (*security*) maupun keamanan ekonomi. Jadi, dalam era ketergantungan ini, Jepang menyadari bahwa kelangsungan pembangunan di Jepang tidak hanya tergantung pada faktor keamanan dalam pengertian yang sempit

tetapi juga keamanan suplai bahan-bahan mentah. Singkatnya, Jepang sangat peka dan rawan terhadap perubahan dalam hubungan antara aktor-aktor yang membentuk sistem internasional. Dan kebijakan keamanan komprehensif, menurut pandangan pemimpin Jepang, dianggap sebagai kebijakan yang memadai untuk menciptakan tata politik internasional yang kondusif bagi Jepang.

Konsep merkantilisme Jepang itu ditanggapi oleh beberapa sektor di Amerika Serikat. Institusi-institusi keuangan Amerika Serikat, misalnya, dapat menerima konsep itu karena hal itu bisa menciptakan industri yang dinamis. Sebagai akibatnya pertumbuhan industri akan lebih cepat daripada perkembangan institusi keuangan. Tetapi industri yang dinamis di suatu negara sudah tentu sangat membutuhkan institusi keuangan yang cukup kuat di negara lain. Ini berarti bahwa kepentingan-kepentingan sektor tertentu di Amerika Serikat tidak hanya mendukung liberalisme internasional Amerika Serikat, tetapi juga menerima konsep merkantilisme internasional Jepang. Meskipun Amerika Serikat dapat menerima konsep merkantilisme internasional, tidak berarti bahwa tidak ada *spill over* ataupun kesenjangan akibat perbedaan antara kedua konsep itu.

Misalnya persoalan tawar-menawar antara bank-bank Amerika Serikat dan bank-bank Jepang; Bank-bank Amerika dianggap memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada bank-bank Jepang dalam masalah *international lending*, tetapi bank-bank Amerika tidak memiliki dana yang cukup seperti yang dimiliki oleh bank-bank Jepang. Persoalan tawar-menawar muncul oleh karena Amerika Serikat mengharapkan agar arus dana Jepang diarahkan untuk keuntungan

<sup>21</sup>Robert W. Barnett, *Beyond War Japan's Concept of Comprehensive National Security* (New York: Pergamon Press, 1984), hal. 1-6.

Amerika, misalnya untuk membantu membiayai hutang Amerika Latin; sedangkan bank-bank Jepang tetap menginginkan agar mereka beroperasi dalam sistem keamanan yang "murah" yang ditopang oleh kekuatan militer Amerika Serikat. Mengenai masalah ini seorang pengamat mengatakan bahwa bank-bank Amerika perlu tetap mendukung strategi penangkal yang diperluas Amerika Serikat terutama di kawasan Pasifik, sedangkan bank-bank Jepang membantu menyediakan dana untuk proyek-proyek bank Amerika terutama di kawasan Amerika Latin.<sup>22</sup>

Diskusi di atas menunjukkan bahwa adanya penekanan yang berbeda dalam konsep yang dianut Amerika Serikat dan Jepang justru memberi Jepang peluang untuk menikmati posisi yang lebih baik dan menciptakan lingkungan politik internasional yang menguntungkan Jepang. Apalagi paradigma yang diciptakan oleh Amerika Serikat itu beberapa tahun belakangan ini dianggap mulai memudar,<sup>23</sup> sementara ekonomi Jepang dan ekonomi Asia Timur lainnya, menurut laporan *Newsweek*, 22 Februari 1988, bergerak ke arah suatu posisi untuk menciptakan paradigma Pasifik yang menurut majalah di atas ditandai dengan munculnya kekuatan Asia. Dilihat dari perspektif ini Jepang tidak hanya akan menjadi negara *core* dalam paradigma Pasifik, tetapi juga akan mampu memberi hasil yang positif kepada banyak negara.

<sup>22</sup>Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978), hal. 328.

<sup>23</sup>Norman Macrae, "Pacific Century, 1975-2075," *The Economist*, 4 Januari 1975, hal. 15. Lihat juga "Pacific Century," laporan khusus, *Newsweek*, 22 Februari 1988, hal. 8; Samuel Huntington, "The US Decline or Renewal," *Foreign Affairs*, Vol. 67, No. 22 (Winter 1988/1989), hal. 76-96.

## Penutup

Dengan konsep penangkal yang diperluas dan liberalisme internasional, Amerika Serikat memang berhasil menciptakan sistem internasional yang relatif stabil. Negara-negara di kawasan Eropa Barat dan Asia Timur sama-sama menikmati lingkungan yang diciptakan oleh paradigma Amerika Serikat itu. Tetapi pola hubungan yang terdapat di kedua kawasan itu sesungguhnya berbeda. Seperti yang telah kita lihat, hubungan internasional di kawasan Eropa Barat lebih banyak dipola oleh Amerika Serikat. Bantuan-bantuan Rencana Marshal Amerika Serikat pada Eropa Barat dan bantuan-bantuan yang diberikan pada tahun-tahun berikutnya dimaksudkan tidak hanya untuk memperluas kekuatan penangkal Amerika Serikat, tetapi juga untuk menjamin kekuatan pasar uang produk-produk Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian memperluas paradigmanya ini ke kawasan Asia dan secara demikian membuatnya menjadi kekuatan Atlantik sekaligus kekuatan Pasifik. Dari sudut pandang Amerika Serikat, apa yang disebut *Pax Americana* pada saat itu tampaknya telah memperlihatkan kehadirannya yang semi permanen.

Di bawah konsep penangkal yang diperluas dan liberalisme internasional, ekonomi dunia mengalami kemajuan pada sekitar kuartal ketiga dari abad ini, tetapi kemudian menurun pada kuartal terakhirnya. Pada kuartal ketiga ketika di seluruh dunia kegiatan ekonomi dan bisnis yang dipimpin Amerika Serikat maju, beberapa negara mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi daripada Amerika Serikat. Misalnya, pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an Eropa Barat dan Jepang merupakan contohnya. Pada 1970-an dan 1980-an contoh lebih menonjol dapat ditemukan di kawasan Asia Timur.

Dari sudut pandang global, menurunnya ekonomi dunia, mungkin sebagai akibat kemunduran relatif hegemoni global dan regional Amerika Serikat, melahirkan persaingan bidang ekonomi internasional yang semakin keras. Seiring dengan menurunnya ekonomi dunia, tampak naiknya secara relatif ekonomi beberapa negara di kawasan Pasifik, terutama Asia Timur. Yang paling menonjol di antara negara-negara yang berprestasi adalah negara-negara industri baru Asia. Tetapi di antara negara-negara industri ini, Jepang berprestasi jauh lebih baik daripada negara-negara lain dalam kategori ini. Jadi yang terlihat sesungguhnya adalah keunggulan kompetitif di kawasan Pasifik.

Dengan memanfaatkan bantuan-bantuan yang sama dengan bantuan yang pernah diberikan oleh Amerika Serikat kepada Jerman Barat dan memobilisasi kekuatan birokrasi yang sengaja dipertahankan oleh penguasa okupasi Amerika Serikat, Jepang pada dasawarsa berikutnya mampu menempatkan dirinya dalam daratan negara-negara industri maju yang telah lebih dulu lahir. Peranan Jepang sebagai pemicu pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik (Asia Timur) telah menyumbang pada terbentuknya keistimewaan-keistimewaan (*features*) kawasan Pasifik. Selanjutnya, melalui visi merkantilisme internasional dan penangkal terbatas, Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya membentuk paradigma Pasifik yang merupakan saingan dari paradigma Atlantik yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Dalam arti bahwa hubungan internasional untuk dasawarsa mendatang akan sangat ditentukan oleh bagaimana Amerika Serikat dan Jepang, dengan visi atau konsepnya masing-masing, menata hubungan antar aktor internasional dalam kedua paradigma itu.

Kalau analisis yang diajukan oleh majalah *Newsweek* di atas benar, maka besarnya perhatian terhadap peranan Jepang (dan negara-negara industri baru di Asia) dalam konteks paradigma Pasifik dewasa ini sekurang-kurangnya merupakan petunjuk munculnya kekuatan Asia. Hal ini bisa diartikan bahwa analisis hubungan internasional dalam dasawarsa berikutnya akan lebih difokuskan pada hubungan-hubungan dalam kerangka paradigma Pasifik di mana Amerika Serikat tidak lagi dilihat sebagai bagian integral dari fenomena Pasifik. Malahan ada yang berpendapat bahwa Jepang harus mengambil tanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas rezim internasional dan mungkin Amerika Serikat harus menerima pergeseran ke arah hegemoni Jepang.<sup>24</sup>

Dari sudut pandang Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya, konsep merkantilisme internasional diartikan sebagai refleksi kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Pasifik yang didasarkan atas keunggulan komparatif yang dinamis dalam pasar internasional. Seperti yang telah kita lihat di atas, pertumbuhan ekonomi dalam pola angsa terbang telah membuka peluang negara-negara di Asia untuk melakukan kompetisi yang lebih tajam. Demikian pun, konsep keamanan komprehensif dapat diartikan sebagai kerjasama komprehensif antar negara-negara di kawasan Pasifik dan kekuatan penangkal yang dikembangkan hanya ditujukan untuk tujuan terbatas, yaitu perlindungan terhadap teritori nasional masing-masing negara. Pemikiran inilah yang membedakan dari pemikiran yang mendasari paradigma Atlantik.

<sup>24</sup>Sebagaimana dikutip oleh Hadi Soesastro, "The Role of the Pacific Basin in the International Political Economy," *Foreign Relations Journal*, Vol. IV, No. 2 (Juni 1989), hal. 73.

Apa yang hendak disimpulkan di sini bukan untuk menunjukkan bahwa paradigma yang satu lebih kuat daripada paradigma lainnya, tetapi untuk menunjukkan kenyataan bahwa kedua paradigma itu, dengan masing-masing negara intinya, masih akan terus berinteraksi dalam dasawarsa berikutnya. Dan hasil interaksi itu dapat berupa meningkatnya paradigma yang satu yang berarti pula memudarnya paradigma

yang lain. Di sinilah sebenarnya letak dialektika antara kedua paradigma hubungan internasional itu. Amerika Serikat dan Jepang tampaknya tetap akan menjadi fokus analisis dalam kerangka paradigma-paradigma itu. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah pernyataan Herman Kahn beberapa tahun yang lalu, bahwa Jepang merupakan *super-state* dan tidak akan pernah menjadi *super-power*.



ASIA, dan pada tingkatasi pasar  
akan merupakan suatu faktor yang  
sangat penting. Kedua paradigma ini  
tidak hanya akan memengaruhi  
sistem politik internasional, tetapi  
juga akan mempengaruhi sistem  
ekonomi internasional. Kedua paradigma  
ini akan mempengaruhi sistem  
politik internasional, tetapi juga  
akan mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional. Kedua paradigma ini  
tidak hanya akan memengaruhi  
sistem politik internasional, tetapi  
juga akan mempengaruhi sistem  
ekonomi internasional. Kedua paradigma  
ini akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional. Kedua paradigma ini  
tidak hanya akan memengaruhi  
sistem politik internasional, tetapi  
juga akan mempengaruhi sistem  
ekonomi internasional. Kedua paradigma  
ini akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional.

1982, dengan demikian akan  
program komprehensif yang akan  
dapat mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional. Kedua paradigma ini  
tidak hanya akan memengaruhi  
sistem politik internasional, tetapi  
juga akan mempengaruhi sistem  
ekonomi internasional. Kedua paradigma  
ini akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional. Kedua paradigma ini  
tidak hanya akan memengaruhi  
sistem politik internasional, tetapi  
juga akan mempengaruhi sistem  
ekonomi internasional. Kedua paradigma  
ini akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional.

Program transposisi pada tingkat  
negara akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional. Kedua paradigma ini  
tidak hanya akan memengaruhi  
sistem politik internasional, tetapi  
juga akan mempengaruhi sistem  
ekonomi internasional. Kedua paradigma  
ini akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional.

negara akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional. Kedua paradigma ini  
tidak hanya akan memengaruhi  
sistem politik internasional, tetapi  
juga akan mempengaruhi sistem  
ekonomi internasional. Kedua paradigma  
ini akan mempengaruhi sistem politik  
internasional, tetapi juga akan  
mempengaruhi sistem ekonomi  
internasional.